



PERBANDINGAN

PENITENSIER MILITER DAN UMUM
PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA



RENDI UMBARA, S.H., M.H.

Perbandingan Penitensier Militer dan Umum pada Hukum Nasional Indonesia

Rendi Umbara, S.H., M.H.

Penerbit

PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara

Perbandingan Penitensier Militer dan Umum pada Hukum Nasional Indonesia

Rendi Umbara

ISBN :
Cetakan Pertama, Maret 2026

Editor:
Dr. Dadang Saepuloh

Diterbitkan oleh:
PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara
Jl. Perdamaian No.79, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15141

Berminat untuk menerbitkan dan mencetak buku hubungi:

Email: bidaracinpress@gmail.com
Whatsapp: +62 815-8558-2370

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *Perbandingan Penitensier Militer dan Umum dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbandingan sistem penitensier dalam ranah militer dan umum di Indonesia, serta menganalisis perbedaan dan persamaan keduanya dalam kerangka hukum nasional.

Sistem hukum nasional Indonesia mengenal adanya diferensiasi peradilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan efektivitas dan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, sistem peradilan umum dan sistem peradilan militer memiliki karakteristik, landasan filosofis, serta mekanisme pelaksanaan pidana yang berbeda. Perbedaan tersebut berimplikasi pada orientasi pidana, pola pembinaan, serta sistem pengawasan yang diterapkan, yang pada akhirnya tetap harus selaras dengan prinsip Negara Hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Buku ini menguraikan bagaimana sistem pidana militer dipengaruhi oleh doktrin disiplin, hierarki, dan kepentingan pertahanan negara, sementara sistem sipil lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Analisis dilakukan secara normatif dan komparatif untuk menghadirkan pemahaman yang proporsional mengenai relasi kedua sistem tersebut dalam struktur hukum nasional Indonesia.

Buku ini disusun untuk menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum pidana dan hukum militer di Indonesia. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan

saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 26 November 2025

Penulis,

Rendi Umbara, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN PERBANDINGAN PENITENSIER MILITER DAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	
A. Perbandingan Penitensier Militer Dan Umum Dalam Sistem Hukum Indonesia	1
B. Paradigma Pemasyarakatan Humanis Diimplementasikan Secara Konsisten Dalam Kedua Sistem	13
BAB II HUKUM PENITENSIER DAN PERKEMBANGAN.....	22
A. Pengertian dan Perkembangan Penitensier	22
B. Asas-Asas Hukum Penitensier	30
C. Landasan Hukum Penitensier Umum	35
D. Bentuk dan Jenis Pidana dalam Hukum Pidana Umum.....	39
BAB III PENITENSIER UMUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	
A. Organisasi Pelaksana Pidana Umum.....	55
B. Tahapan Pelaksanaan Pidana Umum	65
C. Tinjauan Pembinaan Narapidana	69
D. Pengawasan dan Evaluasi	83
BAB IV PENITENSIER MILITER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	
A. Landasan Hukum dan Karakteristik.....	87
B. Kedudukan Penitensier dalam Sistem Hukum Pidana Nasional.....	91
C. Karakteristik Pidana dan Pembinaan di Penitensier Militer	93

D.	Karakteristik Penitensier Militer dalam Sistem Peradilan Militer.....	100
F.	Konsistensi Penerapan Paradigma Pemasyarakatan Humanis	110
G.	Analisis Ketidaksinkronan Sistem Pemidanaan Menggunakan Teori Lawrence M. Friedman.....	113
H.	Implikasi Dualisme Penitensier terhadap Prinsip Negara Hukum.....	117
I.	Urgensi Reformasi Penitensier Militer.....	120
J.	Model Ideal Panitensier Militer Berbasis Humanisasi Kontekstual	121
K.	Posisi Penitensier Militer dalam Sistem Hukum Nasional	123
L.	Analisis Perbandingan dalam Sistem Hukum Indonesia	125
M.	Landasan Hukum	126
N.	Bentuk dan Jenis Pidana Militer	130
O.	Organisasi Pelaksana Pidana Militer.....	131
P.	Tahapan Pelaksanaan Pidana Militer	132
BAB V PERBANDINGAN DAN SINKRONISASI		133
A.	Perbandingan Landasan Filosofis	133
B.	Perbandingan Jenis Sanksi	143
C.	Perbandingan Pelaksanaan	148
D.	Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	151
KESIMPULAN		160
DAFTAR PUSTAKA		162
BIOGRAFI PENULIS		166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Perbandingan Historis Normatif.....	10
Tabel 1.2. Perbandingan Konsistensi Implementasi Paradigma Humanis (Sipil–Militer)	18
Tabel 2.1. Perbandingan Singkat Ketiga Teori	27
Tabel 2.2. Ringkasan Tabel Implementasi Asas Pengayoman	32
Tabel 2.3. Analisis Normatif Landasan Hukum Sistem Pemasyarakatan	37
Tabel 2.4. Perbandingan Pidana Kurungan dan Pidana Penjara	44
Tabel 2.5. Perbandingan Pidana Denda, Pidana Kurungan, dan Pidana Penjara	49
Tabel 2.6. Analisis Jenis Pidana Umum dan Mekanisme Eksekusi	53
Tabel 3.1. Perbedaan Pendekatan Retributif Pendekatan Social Defence (Ancel)	56
Tabel 3.2. Perbandingan Konseptual tentang Penahanan dan Perlindungan HAM di Rutan.....	59
Tabel 3.3. Perbedaan Prinsipil Rutan dan Lapas.....	62
Tabel 3.4. Kesimpulan Sederhana.....	63
Tabel 3.5. Organisasi Pelaksana Pidana Umum dan Fungsinya	64
Tabel 3.6. Ringkasan Tahapan Pelaksanaan Pidana Penjara.....	68
Tabel 3.7. Jenis-Jenis Remisi (Tabel Perbandingan).....	72
Tabel 3.8. Perbedaan Singkat.....	75
Tabel 3.9. Perbedaan Karakteristik Asimilasi	77
Tabel 3.10. Pemetaan Pembinaan Narapidana dengan Teori Pemidanaan	81
Tabel 3.11. Sistem Pengawasan Berlapis dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan.....	85
Tabel 4.1. Perspektif Teori Pemidanaan.....	128
Tabel 5.1. Perbandingan Sistem Peradilan Umum Dan Sistem Peradilan Militer	136
Tabel 5.1. Perbandingan Sistem Peradilan Umum Dan Sistem Peradilan Militer.....	138
Tabel 5.3. Perbandingan Karakteristik Penanganan	142
Tabel 5.4. Perbandingan Jenis Sanksi	144
Tabel 5.5. Perbandingan Konsekuensi Pemberhentian	147

Tabel 5.6. Perbandingan Karakteristik Peradilan Umum dan Peradilan Militer	148
Tabel 5.7. Perbandingan Karakteristik Keamanan Sistem Peradilan Umum dan Sistem Peradilan Militer	150
Tabel 5.8. Ringkasan Titik Kritis	154
Tabel 5.9. Analisis Isu Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Militer	155